



e-ISSN3032-601X & p-ISSN3032-7105

Vol. 1, No. 2, Tahun 2024

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 1, No. 2, 2024

Pages: 163–168

Analisis Kritis Terhadap Sektor Pertanian Indonesia dalam Negara Kesejahteraan

Raihan Fadhilah¹, Eli Apud Saepudin, Widiyanti, Suci Patmawati, Nur Rochmah Subchayah

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Bina Bangsa, Serang Banten, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v1i2.1308>

How to Cite this Article

APA : Fadhilah, R., Saepudin, E. A., Widiyanti, Suci, P., & Subchayah, N. R. (2024). Analisis Kritis Terhadap Sektor Pertanian Indonesia dalam Negara Kesejahteraan. *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(2), 163 – 168. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i2.1308>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9

773032

710001

9

773032

601002

Analisis Kritis Terhadap Sektor Pertanian Indonesia dalam Negara Kesejahteraan

Raihan Fadhilah^{1*}, Eli Apud Saepudin², Widiyanti³, Suci Patmawati⁴, Nur Rochmah Subchiyah⁵

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Bina Bangsa, Serang Banten, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email:

raiihannnf9114@gmail.com^{1*}, eli.apudsaepudin@binabangsa.ac.id², widiyawidiya274@gmail.com³,
fatmawatisuci513@gmail.com⁴, umma5176@gmail.com⁵

Diterima: 29-03-2024 | Disetujui: 30-03-2024 | Diterbitkan: 31-03-2024

ABSTRACT

The agricultural sector in Indonesia plays an important role in economic development and community welfare. However, despite its great potential, there are still challenges that need to be overcome to achieve equitable welfare across the country. Through a critical approach, this research aims to analyze the condition of Indonesia's agricultural sector in the context of the welfare state vision. In the context of a welfare state, it is important to ensure that the growth of the agricultural sector provides equitable benefits to all levels of society. Therefore, policies that pay attention to inclusivity, equality and sustainability are needed. The integration of modern technologies, such as digitalized agriculture, can improve efficiency and productivity, while policy reforms can improve market access and investment.

Keywords: *Agricultural Sector ; Critical Analysis ; Welfare ; Agricultural Policy ; Agricultural Technology.*

ABSTRAK

Sektor pertanian di Indonesia memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, terlepas dari potensinya yang besar, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai kesejahteraan yang merata di seluruh negeri. Melalui pendekatan kritis, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sektor pertanian Indonesia dalam konteks visi negara kesejahteraan. Dalam konteks negara kesejahteraan, penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan sektor pertanian memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang memperhatikan inklusivitas, kesetaraan, dan keberlanjutan. Integrasi teknologi modern, seperti pertanian digital, dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sementara reformasi kebijakan dapat meningkatkan akses pasar dan investasi.

Katakunci: Sektor Pertanian ; Analisis Kritis ; Kesejahteraan ; Kebijakan Pertanian ; Teknologi Pertanian.

PENDAHULUAN

Indonesia dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dijuluki sebagai negara agraris. Namun, ironisnya, sektor pertanian masih tertinggal dan belum mampu memberikan kesejahteraan bagi para petani. Di tengah cita-cita negara kesejahteraan, analisis kritis terhadap sektor pertanian Indonesia diperlukan untuk memahami akar permasalahan dan merumuskan solusi yang tepat. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi analisis kritis ini, yang pertama adalah Kesejahteraan, Petani masih terbelenggu dalam kemiskinan dengan pendapatan yang rendah, keterbatasan akses terhadap sumber daya dan teknologi, serta minimnya jaminan sosial. Kedua, Produktivitas Rendah, produktivitas pertanian Indonesia masih tertinggal dari negara lain, karena berbagai faktor seperti terbatasnya infrastruktur, rendahnya penggunaan teknologi, dan belum optimalnya kualitas sumber daya manusia. Ketiga, Konversi Lahan, lahan pertanian terus menyusut akibat konversi untuk pembangunan infrastruktur, industri, dan perumahan yang mengancam ketahanan pangan nasional. Keempat, Masalah Distribusi dan Harga, distribusi hasil panen yang tidak merata dan fluktuasi harga yang tajam sering kali merugikan petani dan konsumen. Dan terakhir, Ketidakpastian Kebijakan, kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah dan tidak berkelanjutan menghambat perkembangan sektor pertanian. (Priyanto & Diwyanto, 2014)

TEORI

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya air, sumber daya lahan, sumber daya hutan, sumber daya laut, serta keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya dan tersebar luas di setiap pulau yang ada di Indonesia. Kekayaan alam yang dimiliki dapat menjadi modal bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi bagi Indonesia dalam menuju negara yang sejahtera. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dapat dioptimalkan salah satunya melalui sektor pertanian. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia seharusnya dapat menjadi peluang untuk mengembangkan sektor pertanian, sehingga dapat menopang kehidupan masyarakat. Namun, kenyataannya sektor pertanian di Indonesia masih terbelakang karena kurangnya analisis kritis terhadap sektor pertanian, pada dasarnya pertanian masih menjadi andalan penciptaan lapangan kerja dalam jumlah yang cukup besar. Meskipun demikian, pertumbuhan sektor pertanian masih berada di bawah pertumbuhan PDB nasional dan masih rendah dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Dalam membahas permasalahan sektor Pertanian, ada baiknya kita membahas sejenak mengenai konsep kesejahteraan yang sering kali dimaknai secara berbeda oleh setiap orang dan negara. (Desiyanti L, 2020)

Kesejahteraan mengandung empat makna, yaitu sebagai kondisi kemakmuran. Definisi ini biasanya merujuk pada istilah kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material, sedangkan Midgley mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai "suatu kondisi atau keadaan sejahtera dari manusia." Kondisi kesejahteraan terjadi ketika kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi serta ketika manusia mendapatkan perlindungan dari risiko-risiko besar yang mengancam kehidupannya, yang kedua sebagai pelayanan sosial. Di Inggris, Australia, dan Selandia Baru, layanan sosial umumnya mengambil lima bentuk: jaminan sosial, perawatan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan layanan sosial pribadi. (ELVIANDRI, 2019)

Ketiga, sebagai tunjangan sosial yang terutama di Amerika Serikat (AS) diberikan kepada masyarakat miskin. Karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah orang miskin, cacat, pengangguran, maka keadaan ini kemudian menimbulkan konotasi negatif terhadap istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya lebih tepat disebut "ketidaksejahteraan sosial" daripada "kesejahteraan sosial." Makna kesejahteraan yang terakhir adalah sebagai suatu proses atau upaya terencana yang dilakukan oleh individu, lembaga sosial, masyarakat dan badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. (Suharto, 2006)

Sebuah negara dikatakan makmur jika memiliki empat pilar utama, yaitu: Kewarganegaraan sosial, Demokrasi penuh, Sistem hubungan industrial modern, dan Hak atas pendidikan dan perluasan sistem pendidikan massal modern. (Studi et al., n.d.)

Kesejahteraan (welfare state) Setidaknya ada dua tipologi negara kesejahteraan, yaitu negara kesejahteraan residual dan negara kesejahteraan institusional. Negara kesejahteraan residual mengasumsikan bahwa tanggung jawab negara sebagai penyedia kesejahteraan berlaku, jika dan hanya jika keluarga dan pasar gagal menjalankan fungsinya dan berpusat pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, seperti kelompok marjinal dan kelompok-kelompok yang layak mendapatkan alokasi kesejahteraan dari negara. (Rachman, 2023)

Sementara itu, negara kesejahteraan institusional bersifat universal, mencakup semua populasi warga negara, dan dilembagakan dalam basis kebijakan sosial yang luas yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Negara kesejahteraan sangat dipengaruhi oleh rezim yang berkuasa di setiap negara (welfare regims). Pengaruh ini terjadi terutama pada kemampuan negara dalam memproduksi dan mendistribusikan kesejahteraan melalui kebijakan-kebijakan sosial. Rezim kesejahteraan merujuk pada pola interaksi dan interelasi dalam produksi dan alokasi kesejahteraan antara negara, rezim pasar, dan keluarga/rumah tangga. Ketiga institusi ini merupakan penyedia kesejahteraan dan tempat individu mendapatkan perlindungan dari risiko sosial. Negara kesejahteraan mengacu pada model pembangunan ideal yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dengan memberikan peran yang lebih penting kepada negara dalam menyediakan layanan sosial yang universal dan komprehensif bagi warganya. (Muslim, 2013)

Indikator penting dari kesejahteraan petani adalah jumlah pendapatan dan keseimbangannya dengan pengeluaran. Dalam hal ini, salah satu alat ukur yang digunakan adalah nilai tukar petani (NTP). Perhitungan NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Semakin tinggi nilai tukar petani, maka semakin tinggi pula daya beli petani terhadap produk konsumsi dan input produksi. NTP merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani secara relatif, dengan demikian semakin tinggi NTP, maka semakin sejahtera pula tingkat kehidupan petani secara relatif. (Tenriawaru et al., 2021).

Secara konseptual, kenaikan atau penurunan NTP merupakan resultan dari arah masing-masing komponen penyusunnya, yaitu komponen penerimaan yang memiliki arah positif terhadap kesejahteraan petani dan komponen pembaharuan yang memiliki arah negatif terhadap kesejahteraan. Pergerakan naik turunnya NTP menggambarkan naik turunnya kesejahteraan petani. Namun, NTP memiliki karakteristik yang cenderung menurun. Ada tiga faktor yang menjelaskan penurunan NTP, yaitu elastisitas pendapatan produk pertanian bersifat inelastis sedangkan produk non pertanian cenderung lebih elastis. Perubahan teknologi pada tingkat yang berbeda lebih menguntungkan produk manufaktur. Terakhir, perbedaan

struktur pasar produk pertanian yang cenderung kompetitif sedangkan struktur pasar produk manufaktur cenderung kurang kompetitif dan mengarah pada pasar monopoli/oligopoli. (Muslim, 2013)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bersumber dari jurnal, tesis, studi kepustakaan, media cetak media elektronik dari berbagai sumber yang relevan. yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami suatu fenomena atau keadaan secara mendalam dan menyeluruh. Metode ini berfokus pada makna dan pengalaman yang dihadapi oleh subjek penelitian, dan tidak menggunakan statistik untuk menganalisis data. (DERMOREDJO, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2023, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional hanya sebesar 13,24%, dibandingkan dengan Thailand (10,54%), Vietnam (13,84%), dan Malaysia (11,54%). Produktivitas pertanian yang masih rendah ini disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktornya adalah konversi lahan, terbatasnya akses terhadap teknologi, dan sumber daya manusia yang kurang berkualitas. Produktivitas padi di Indonesia hanya 5,4 ton per hektar, dibandingkan dengan Vietnam yang mencapai 6,6 ton per hektar. Kesejahteraan petani juga masih rendah, dengan pendapatan dan standar hidup yang jauh dari sejahtera. Pendapatan rata-rata petani per bulan hanya sebesar Rp 1,7 juta. (Paksi et al., 2023)

Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masih rendah. Kebijakan pemerintah di sektor pertanian masih belum fokus dan terarah, sehingga belum mampu mendorong kemajuan sektor pertanian secara signifikan. Sebagai contoh, kebijakan impor beras yang sering berubah-ubah. Koordinasi antar lembaga yang terkait dengan sektor pertanian masih lemah, sehingga sering terjadi tumpang tindih kebijakan dan program. Misalnya, program bantuan benih dari Kementerian Pertanian dan program bantuan pupuk dari Kementerian BUMN tidak terintegrasi Alokasi anggaran untuk sektor pertanian masih belum memadai. Pada tahun 2023, alokasi anggaran untuk sektor pertanian hanya sebesar 2,7% dari APBN. Hal ini jauh di bawah angka ideal yaitu minimal 10%. (3) Akses terhadap Teknologi dan Inovasi: Akses petani terhadap teknologi dan inovasi masih terbatas, terutama bagi petani kecil dan terpinggirkan. Kurangnya pelatihan dan pendampingan bagi petani dalam menggunakan teknologi dan inovasi. Contoh: Banyak petani yang belum terbiasa dengan penggunaan drone untuk penyemprotan pestisida. Penerapan teknologi dan inovasi di sektor pertanian masih belum optimal. Kurangnya investasi di bidang penelitian dan pengembangan (R&D) pertanian, contohnya masih banyak varietas tanaman yang tidak tahan terhadap hama dan penyakit. Perluasan dan pembangunan infrastruktur pertanian masih belum merata, misalnya jaringan irigasi yang belum memadai di banyak daerah. Daya saing produk pertanian Indonesia masih rendah di pasar internasional. Biaya produksi pertanian masih tinggi. Kualitas produk pertanian masih rendah (Subsektor et al., 2023).

Sebagai contoh, produk hortikultura Indonesia kalah bersaing dengan produk Thailand di pasar internasional. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan dan tantangan yang perlu dibenahi. Untuk mewujudkan negara kesejahteraan, diperlukan upaya yang serius dari pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian. Beberapa langkah yang perlu dilakukan. (Ningsih & Kurniawan, 2016)

Pemerintah, memperbaiki fokus dan arah kebijakan di sektor pertanian, memperkuat koordinasi antar lembaga yang terkait dengan sektor pertanian, meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pertanian, memperluas akses petani terhadap teknologi dan inovasi, meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar internasional. Sektor swasta, melakukan investasi di sektor pertanian terutama dalam bidang R&D dan pembangunan infrastruktur, membantu petani dalam meningkatkan akses terhadap teknologi dan inovasi, membantu petani dalam meningkatkan kualitas produk pertanian. (Imania Ikhsani et al., 2020)

Masyarakat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya sektor pertanian, mengkonsumsi produk pertanian dalam negeri, mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian, pembangunan sektor pertanian yang maju dan berkelanjutan merupakan kunci untuk mewujudkan negara kesejahteraan. Sektor pertanian yang maju akan mampu meningkatkan kesejahteraan petani, menyediakan pangan yang cukup dan terjangkau bagi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. (Hidayah & Susanti, 2022)

KESIMPULAN

Pertanian merupakan sektor yang sangat sensitif dan mudah terpengaruh oleh banyak faktor, tidak hanya faktor alam seperti cuaca dan kesuburan lahan, tetapi juga kebijakan ekonomi atau perdagangan, terutama liberalisasi perdagangan dunia/regional untuk komoditas pertanian. Pertanian juga merupakan sektor kunci bagi kemiskinan di negara-negara terbelakang atau negara berkembang (NSB), termasuk Indonesia. Pertanian di masa lalu memiliki beberapa kelemahan, yaitu hanya berfokus pada pertanian, dukungan kebijakan makro yang lemah, dan pendekatan yang sentralistik. Akibatnya, usaha pertanian di Indonesia masih didominasi oleh usaha skala kecil, modal yang terbatas, penggunaan teknologi yang sederhana, sangat dipengaruhi oleh musim, wilayah pasar yang bersifat lokal, umumnya melakukan usaha dengan tenaga kerja keluarga, sehingga menimbulkan involusi pertanian (pengangguran terselubung), akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar yang sangat rendah, pasar komoditas pertanian yang bersifat monopoli/oligopsoni yang dikuasai oleh pedagang besar, sehingga mengakibatkan eksploitasi harga yang merugikan petani. (Normalita, 2023)

DAFTAR PUSTAKA

- DERMOREDJO, S. (2006). *Analisis Penentuan Indikator Utama Pembangunan Sektor Pertanian Di Indonesia: Pendekatan Analisis Komponen Utama*. SOCA: Socioeconomics of Agriculture and Agribusiness, 6(2), 1–26.
- Desiyanti L, N. P. A. (2020). *Analisis Keterkaitan Sektor Pertanian Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia (Analisis Input Output)*. Jurnal Ilmiah Satyagraha, 3(2), 140–157. <https://doi.org/10.47532/jis.v3i2.178>
- ELVIANDRI, E. (2019). *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 31(2), 252. <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>
- Hidayah, I., & Susanti, N. (2022). *Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian Negara Maju dan Negara Berkembang*. Jurnal Salingka Nagari, 1(1), 28–37.

- Imania Ikhsani, I., Eka Tasya, F., Inati, U., Sihidi, I. T., Roziqin, A., & Romadhan, A. A. (2020). Policy Directions Of The Agricultural Sector In Indonesia To Face The Era Of The Industrial Revolution 4.0. JKAP (Jurnal Administrasi And Public Policy), V(2), 135. <https://doi.org/10.25077/jakp>
- Muslim, M. (2013). Pertanian Di Indonesia Dalam. Jispo, 1(ANALISIS KRITIS TERHADAP SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA DALAM NEGARA KESEJAHTERAAN), 58–69.
- Ningsih, E. A., & Kurniawan, W. (2016). Daya Saing Dinamis Produk Pertanian Indonesia di ASEAN (Dynamic Competitiveness of Indonesian Agricultural Products in ASEAN). Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 9(2), 117–125.
- Normalita, I. (2023). Analisis Wacana Kritis Tentang Pekerjaan Petani Muda di Media Sosial. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 10(1), 69. <https://doi.org/10.22146/jps.v10i1.81843>
- Paksi, A. K., Musyaffa, N. F., & Iswari, R. D. (2023). Pandemi Covid-19: Dampak Global dan Peluang Bagi Sektor Pertanian Indonesia. Intermestic: Journal of International Studies, 7(2), 677. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n2.14>
- Priyanto, D., & Diwyanto, K. (2014). Agricultural Development in the Borderline Areas of East Nusa Tenggara and Democratic Republic of Timor Leste. Pengembangan Inovasi Pertanian, 7(4), 207–220.
- Rachman, C. I. (2023). Korelasi Konsep Negara Kesejahteraan menurut Gosta Esping-Andersen dengan Pancasila dalam Pengaturan Otonomi Daerah di Indonesia. Jurnal Aktualisasi Pancasila, 1(1), 9–13.
- Studi, P., Politik, I., Ilmu, F., Dan, S., Pemerintahan, I., Ar-raniry, U. I. N., & Aceh, B. (n.d.). TENTANG KONSEP KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN.
- Subsektor, K., Terhadap, P., Atas, P. D. B., & Harga, D. (2023). 2022 , Subsektor Apa Terbesar ? 2022.
- Suharto, E. (2006). Peta Dan Dinamika Welfare S. 1–15.
- Tenriawaru, A. N., Arsyad, M., Amiruddin, A., Viantika, N. M., & Meilani, N. H. (2021). Analisis dan Determinan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) di Provinsi Sulawesi Selatan. AGRITEXTS: Journal of Agricultural Extension, 45(2), 146. <https://doi.org/10.20961/agritexts.v45i2.57364>